

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, H., & Indah, A. T. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jakarta Tahun 2015–2022. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4).
- Arsipen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh 2008–2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2)
- Aulia Rahma Putri, A., & Ribawati, E. (2025). Analisis pengaruh pajak daerah, belanja bantuan sosial, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2020–2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(3), 25
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2020–2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2024). Laporan Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Becker, GS (1993). *Modal manusia: Analisis teoretis dan empiris, dengan referensi khusus pada pendidikan* (edisi ke-3). The University of Chicago Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2024). Laporan Realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2020–2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, A., & Maulana, M. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 9(2), 115–127.
- Febriyanto, H. (2022). Pengaruh DAU, DAK Fisik dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 7(3).
- Ginting, E. M., Pulungan, F. A., Mujasmaraa, F. D., Talita, R. T., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2020). *Basic Econometric*
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB 2013–2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1).

- Harsya, S., Abdiksa, D., Ilham, M., & Kamrani, N. (2023). Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017–2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Hidayat, T., & Prasetyo, A. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 10(2), 98–112.
- Jahang, P. A., Wenhen, F. Y. A., & Rara, A. T. (2024). Analisis Pengaruh PAD, Pengeluaran Pemerintah dan UMK terhadap IPM di Kabupaten Mimika. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4).
- Kuncoro, M. (2019). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Nengsih, T. A., & Martaliah, N. (2021). Regresi Data Panel.
- Nugraha, R., & Fadillah, R. (2021). Pengaruh Belanja Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(3), 145–158.
- Nurliana, & Syafira, S. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2).
- Nurhabibah, A., Boedirochminarni, A., & Sari, N. P. (2022). Pengaruh PAD dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1).
- Oates, W. E. (2021). *Fiscal Federalism*. Edward Elgar Publishing.
- Pattiasina, F., Wambrauw, M., & Lani, J. (2023). Evaluasi Efektivitas Dana Otsus terhadap IPM di Provinsi Papua. *Jurnal Pembangunan Daerah Papua*, 7(2), 101–119.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Otonomi Khusus.
- Regina, E. N., Suharianto, J., Febyanti, I., & Siregar, S. A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara 2004–2022. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Sahlan, E., Yusuf, & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(1).
- Sitorus, M., & Handayani, F. (2022). Peran Belanja Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Timur. *Jurnal Sosio Ekonomi Regional*, 11(4), 231–249.
- Snarko, C. T., & Hendarati, I. M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan

- Manusia di Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic Development Issues*, 6(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.).
- Sugiyono, L., & Prasetyawati, M. D. (2019). Determinasi Kemiskinan Penduduk Jawa Tengah 2013-2017. 478–483
- Sulatri, E., & Efendri. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015–2019. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(2).
- Syafira, R., Khoirudin, R., & Qurrota A'yun, I. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2014–2022. *Jurnal Simic Economic*, 7(1).
- Suryani, A., & Kurniawan, A. (2022). Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat. *Jurnal Keuangan Publik dan Daerah*, 9(1), 45–60.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2018). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Thazafi, M. R. (2022). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Aceh 2016-2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock. New York: UNDP.*
- World Bank. (2022). Fiscal Decentralization and Human Development Outcomes in Developing Economies. Washington, D.C.: The World Bank Group.*
- Yuliani, D., & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 87–99.
- Zainuddin, M., & Rahmawati, S. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh. *Jurnal Keuangan dan Daerah*, 7(1), 45–60.